

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO

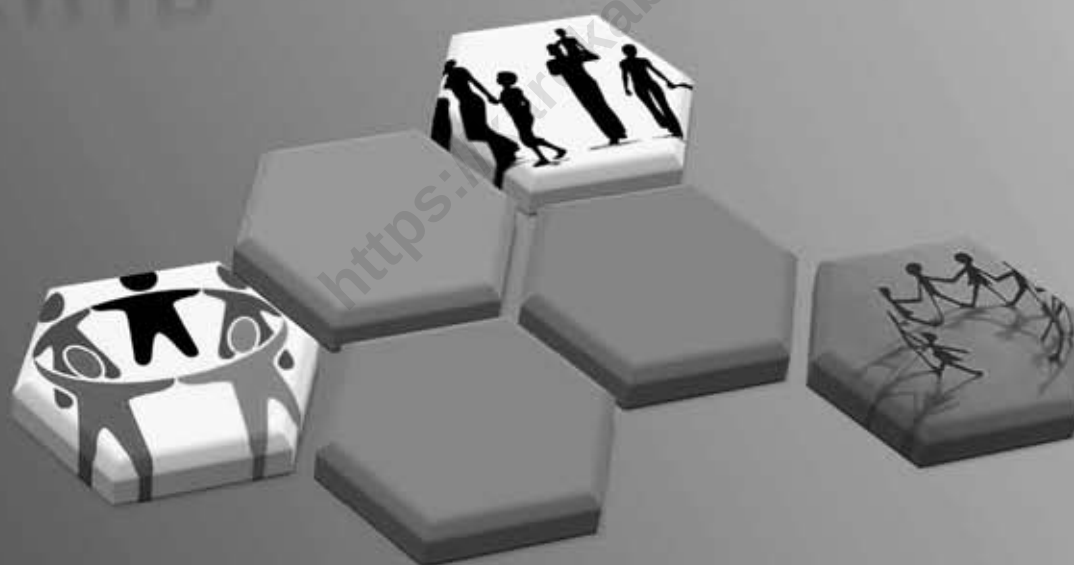
2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARO**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO

2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO 2016

ISBN : 978-602-6738-20-2
Katalog : 4102004.1211
No. Publikasi : 1211.1722
Ukuran Buku : 27,94 cm x 21,59 cm
Jumlah Halaman : x + 64 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

Dicetak oleh :

CV. E'Karya

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2016 sebagai salah satu publikasi yang direncanakan akan terbit secara rutin tahunan.

Publikasi ini menyajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan. Sumber data yang digunakan adalah data hasil pengolahan Susenas, Sakernas, Sensus Penduduk serta data sekunder dari dinas terkait.

Publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Karo sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Berastagi, November 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karo



Doni Bukit, SE

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
v	Daftar Isi
xii	Daftar Tabel
ix	Daftar Gambar

1 Pendahuluan

1	3	Latar Belakang
	3	Tujuan
	4	Sumber Data
	4	Sistematika Penyajian

5 Metodologi

2	7	Kependudukan
	8	Kesehatan
	8	Pendidikan
	9	Ketenagakerjaan
	10	Taraf dan Pola Konsumsi
	10	Perumahan

15 Kependudukan

3	16	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
	17	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)
	19	Kepadatan dan Distribusi Penduduk

21 Kesehatan

4	23	Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)
	25	Penolong Kelahiran
	26	Angka Harapan Hidup

29 Pendidikan

5	32	Angka Partisipasi Sekolah
	34	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
	35	Angka Buta Huruf

37

Ketenagakerjaan

6

- 40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- 41 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 41 Karakteristik Penduduk Bekerja

45

Taraf dan Pola Konsumsi

7

- 47 Pengeluaran Rumahtangga
- 48 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per kapita/ Bulan

51

Perumahan

8

- 54 Kondisi Rumah Tinggal
- 56 Fasilitas Rumah Tinggal

61

Kemiskinan

9

- 63 Perkembangan Penduduk Miskin

Daftar Tabel

3

- 17 Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo, 2011 -2016
- 18 Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin 2016
- 19 Tabel 3.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2016

4

- 25 Tabel 4.1. Persentase Penduduk di Kabupaten Karo yang Berobat Jalan dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2016

5

- 36 Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin 2016

6

- 40 Tabel 6.1 Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2015

7

- 48 Tabel 7.1 Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Karo, 2012-2016
- 49 Tabel 7.2 Persentase Penduduk Kabupaten Karo Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2012-2016

8

- 55 Tabel 8.1. Kondisi Perumahan Kabupaten Karo, 2014- 2016
- 57 Tabel 8.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2014- 2016
- 58 Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Karo, 2014- 2016
- 59 Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Karo, 2016

<https://karokab.bps.go.id>

Daftar Gambar

3

16

Grafik
3.1.

Perkembangan LPP Kabupaten Karo, 1990-2016

4

26

Grafik
4.1.

Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut
Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2016

27

Grafik
4.2.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo,
2012- 2016

5

33

Grafik
5.1.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten
Karo, 2012 - 2016

35

Grafik
5.2.

Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi
Ditamatkan, 2012-2016

6

42

Grafik
6.1.

Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Karo Menurut
Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2015

43

Grafik
6.2.

Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Karo Menurut
Status Pekerjaan, 2015

8

54

Grafik
8.1.

Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas
Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Karo, 2016

56

Grafik
8.2.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di
Kabupaten Karo, 2016

9

16

Grafik
9.1.

Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo, 2002-
2016

PENDAHULUAN



<https://karokab.bps.go.id>

1 Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Karo. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2016.

Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Kabupaten Karo dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2016 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

METODOLOGI



<https://karokab.bps.go.id>

2 Metodologi

Kependudukan

- Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor

kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.

- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak

terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.

- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan
- sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

KEPENDUDUKAN



<https://karokab.bps.go.id>

<https://karokab.bps.go.id>

3 Kependudukan

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

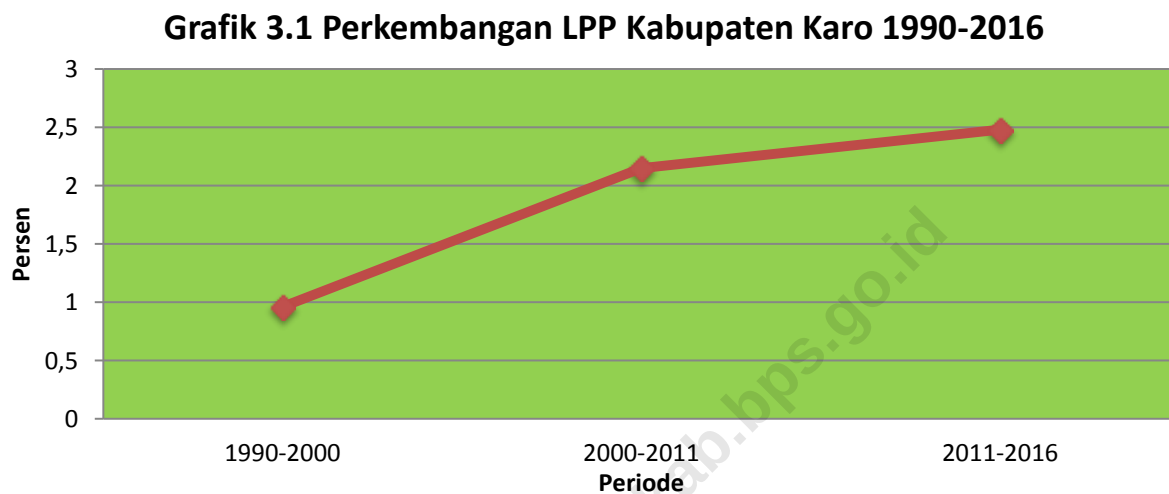
Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam angka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2016, jumlah penduduk Kabupaten Karo 396.598 jiwa. Pada periode 1990-2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat 0,96 persen, periode 2010-2011 adalah sebesar 2,15 persen, periode 2010-2016 adalah sebesar 2,48 persen (grafik 3.1).



Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.

Pada tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Karo menurut kecamatan serta laju pertumbuhan penduduk periode 2011-2016. Kecamatan Merdeka, Berastagi, dan Kabanjahe merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling besar, masing-masing sebesar 3,37 persen, 3,20 persen, dan 3,02 persen. Sebaliknya Kecamatan Barusjahe, Tiganderket, dan Juhar adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling kecil yaitu berjumlah 1,54 persen, 1,59 persen, dan 1,67 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Merdeka, Berastagi, dan Kabanjahe yang merupakan kecamatan yang termasuk dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Karo kemungkinan menjadi daya tarik bagi penduduk kecamatan lain di sekitarnya untuk melakukan perpindahan ke daerah tersebut.

Tabel 3.1.
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Karo, 2011 - 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)		Laju Pertumbuhan/ tahun (%) 2011-2016
	2011	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mardinding	17 222	19 281	2,48
2. Laubaleng	17 879	20 009	2,56
3. Tigabinanga	20 086	22 108	2,13
4. Juhar	13 368	14 384	1,67
5. Munte	19 870	21 428	1,71
6. Kutabuluh	10 685	11 531	1,72
7. Payung	10 938	12 024	2,10
8. Tiganderket	13 301	14 260	1,59
9. Simpang Empat	19 192	20 739	1,75
10. Naman Teran	12 916	14 460	2,48
11. Merdeka	13 434	15 712	3,37
12. Kabanjahe	63 918	73 479	3,02
13. Berastagi	42 939	49 805	3,20
14. Tigapanah	29 593	33 687	2,82
15. Dolat Rayat	8 374	9 378	2,48
16. Merek	18 223	20 373	2,45
17. Barusjahe	22 304	23 850	1,54
Karo	354 242	396 598	2,48

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2017

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Karo umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki, yang diperlihatkan melalui rasio jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2016 diketahui jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo 196.898 jiwa dan perempuan 199.700 jiwa atau sex ratio sebesar 98,60 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk
Menurut Kecamatan, dan Jenis Kelamin, 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mardingding	9 626	9 655	19 281	99,70
2. Laubaleng	9 945	10 154	20 099	97,94
3. Tigabinanga	11 004	11 104	22 108	99,10
4. Juhar	7 166	7 218	14 384	99,28
5. Munte	10 731	10 697	21 428	100,32
6. Kutabuluh	5 703	5 828	11 531	97,86
7. Payung	5 945	6 079	12 024	97,80
8. Tiganderket	6 954	7 306	14 260	95,18
9. Simpang Empat	10 366	10 373	20 739	99,93
10. Naman Teran	7 362	7 098	14 460	103,72
11. Merdeka	7 880	7 832	15 712	100,61
12. Kabanjahe	35 920	37 559	73 479	95,64
13. Berastagi	24 801	25 004	49 805	99,19
14. Tigapanah	16 664	17 023	33 687	97,89
15. Dolat Rayat	4 639	4 739	9 378	97,89
16. Merek	10 437	9 936	20 373	105,04
17. Barusjahe	11 755	12 095	23 850	97,19
Karo	196 898	199 700	396 598	98,60

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2017

Dilihat masing-masing kecamatan di Kabupaten Karo, pada tahun 2016 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kecamatan Merek sebesar 105,04 disusul Kecamatan Namanteran dan Merdeka yaitu masing-masing sebesar 103,72 dan 100,61. Sebaliknya Kecamatan Tiganderket dan Kabanjahe adalah kecamatan dengan sex ratio paling kecil yaitu 95,18 dan 95,64.

Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya penyebaran penduduk antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Tabel 3.3
Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Distribusi Penduduk
Menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Distribusi Penduduk (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mardinding	267,11	72,18	4,86
2. Laubaleng	252,60	79,57	5,07
3. Tigabinanga	160,38	137,85	5,57
4. Juhar	218,56	65,81	3,63
5. Munte	125,64	170,55	5,40
6. Kutabuluh	195,70	58,92	2,91
7. Payung	47,24	254,53	3,03
8. Tiganderket	86,76	164,36	3,60
9. Simpang Empat	93,48	221,85	5,23
10. Naman Teran	87,82	164,65	3,65
11. Merdeka	44,17	355,72	3,96
12. Kabanjahe	44,65	1 645,67	18,53
13. Berastagi	30,50	1 632,95	12,56
14. Tigapanah	186,84	180,30	8,49
15. Dolat Rayat	32,25	290,79	2,36
16. Merek	125,51	162,32	5,14
17. Barusjahe	128,04	186,27	6,01
Karo	396 598	186,44	100,00

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2017

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah kelurahan. Kecamatan Kabanjahe sebagai ibu kota Kabupaten Karo yang luasnya sebesar 44,65 km² adalah kecamatan terpadat yang setiap kilometer persegi ditinggali 1.646 jiwa. Disusul Kecamatan Berastagi, dengan luas hanya 30,50 km² dari luas daratan Kabupaten Karo memiliki kepadatan penduduk mencapai 1.632,95 jiwa/km². Pada umumnya daerah kelurahan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk melakukan migrasi. Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah pedesaan. Kecamatan Kutabuluh hanya dihuni oleh 59 jiwa per kilometer persegi, disusul Kecamatan Juhar dan Mardingding yaitu 66 jiwa per kilometer persegi dan 72 jiwa per kilometer persegi.

BAB

4

KESEHATAN

<https://karokab.bps.go.id>

4 Kesehatan

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Angka kesakitan (Morbidity Rate)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Sejak tahun 2011, tingkat morbiditas di Kabupaten Karo menunjukkan pola yang menurun yang berarti tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Karo dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 29,19 persen penduduk Kabupaten Karo mengalami sakit, kemudian turun menjadi 24,25 dan 13,77 persen masing-masing pada tahun 2013 dan 2015. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang tidak terlalu tinggi yaitu menjadi 14,49 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya pada tahun 2016 laki-laki lebih banyak menderita sakit yaitu sebesar 15,76 persen sedangkan perempuan sebesar 13,24 persen.

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 63,00 persen. Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan kenapa tidak berobat jalan, mengobati sendiri merupakan penyebab utama yakni mencapai 54,16 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah merasa tidak perlu untuk mengobati penyakit dan permasalahan biaya yaitu masing-masing sebesar 41,80 persen dan 2,24 persen. Terkait dengan permasalahan biaya sebenarnya saat ini pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sehingga persentase alasan tersebut merupakan yang terkecil.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk di Kabupaten Karo yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2016

Jenis Kelamin	Berobat Jalan	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan							
		Tidak punya biaya berobat	Tidak ada biaya transportasi	Tidak ada sarana transportasi	Waktu tunggu pelayanan lama	Mengobati sendiri	Tidak ada yang mendampingi	Merasa tidak perlu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-Laki	63,78	2,27	0.00	0.00	0.00	57.99	0.00	36,54	3,20
Perempuan	62,21	2,22	0.00	0.00	0.00	50,42	0.00	46.92	0.45
LK + PR	63,00	2,24	0.00	0.00	0.00	54.16	0.00	41.80	1.81

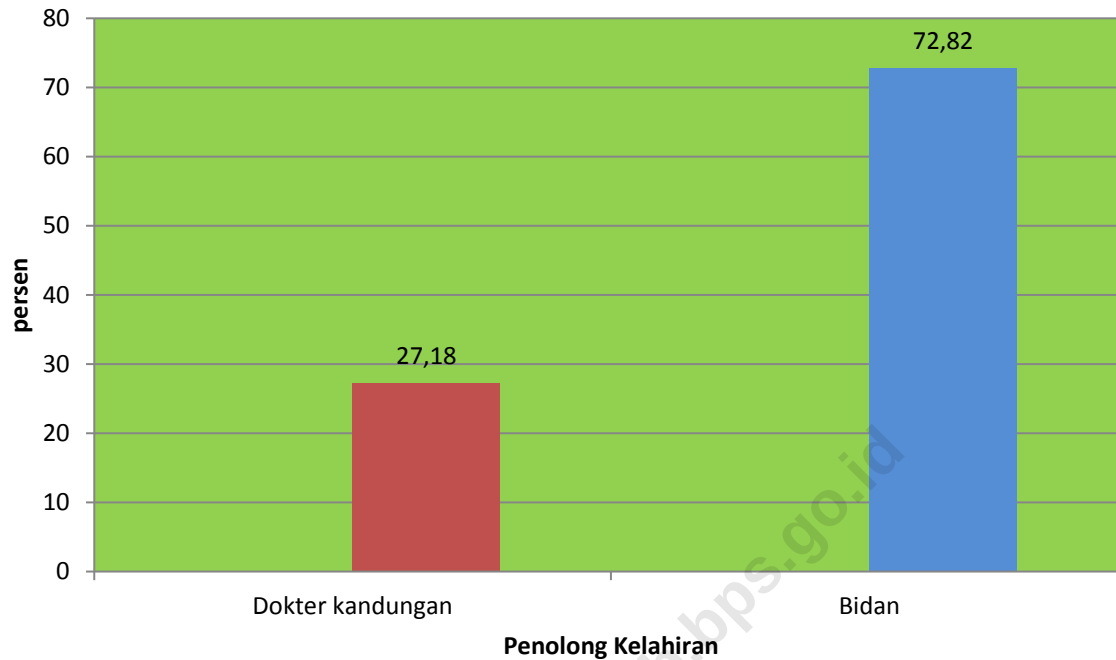
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2016 penolong kelahiran balita di Kabupaten Karo pada umumnya adalah bidan/tenaga medis lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya ditolong oleh bidan adalah sebesar 72,82 persen. Tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap bidan relatif tinggi. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dokter kandungan yaitu sebesar 27,18 persen.

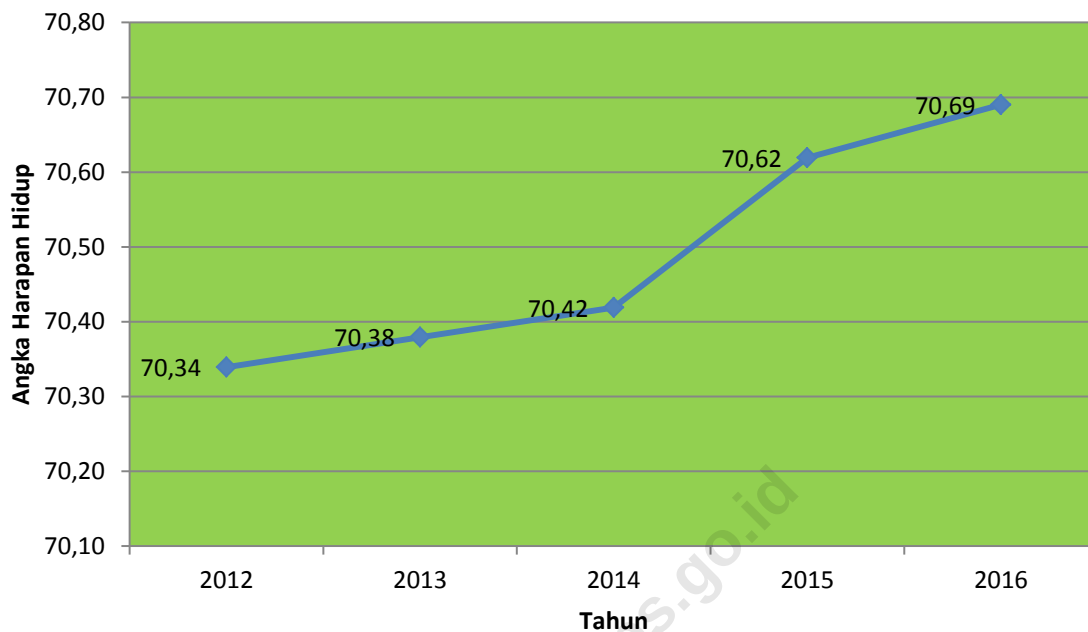
Grafik 4.1. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2016



Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 telah mencapai 70,69.

Grafik 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo, 2012 - 2016



Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.



PENDIDIKAN

<https://karokab.bps.go.id>

5 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran.

Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, diantaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

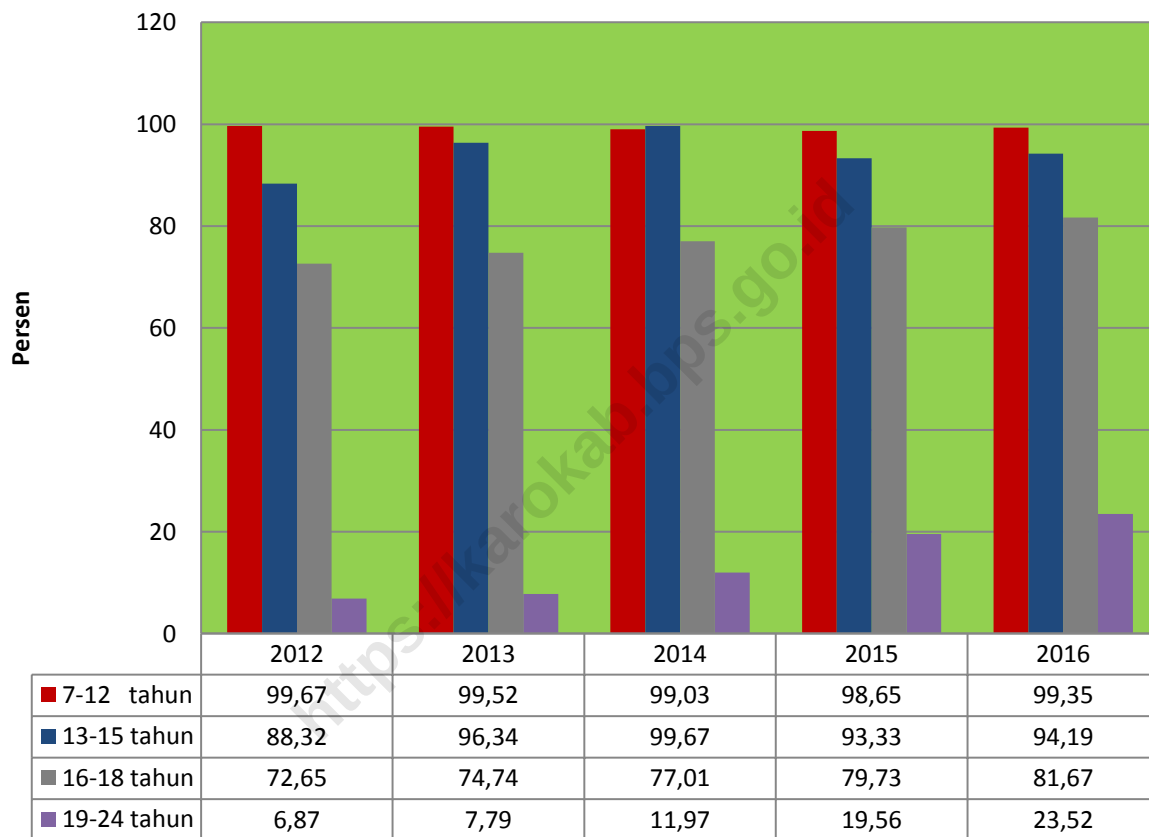
Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem pendidikan. Adakalanya penduduk usia 7 – 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SD.

Grafik 5.1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Karo, 2012-2016



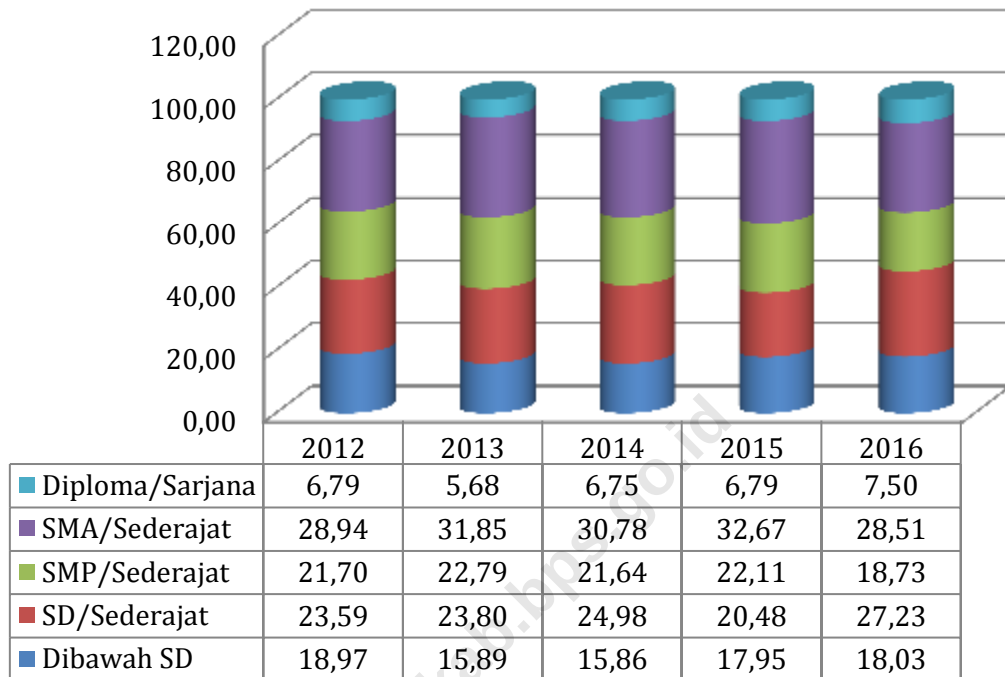
Grafik 5.1. menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Karo. Pada usia 7-12 tahun menurun dari 99,67 persen pada tahun 2012 menjadi 99,35 persen pada tahun 2016 sedangkan pada kelompok umur 13-15 yang meningkat dari 88,32 persen menjadi 94,19 persen pada tahun yang sama. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun, di mana keduanya menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dibanding periode sebelumnya. Pada kelompok umur 16-18 meningkat dari 72,65 persen pada tahun 2012 menjadi 81,67 persen pada tahun 2016 dan kelompok umur 19-24 tahun meningkat dari 6,87 persen menjadi 23,52 persen pada tahun yang sama.

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan Grafik 5.2. dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/Sederajat adalah sebanyak 34,03 persen meningkat dibanding tahun 2011 yang sebesar 31,10 persen. Sebaliknya penduduk yang berpendidikan maksimal SD/Sederajat mengalami penurunan dari 47,18 persen pada tahun 2011 menjadi 41,76 persen pada tahun 2015.

Grafik 5.2. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan, 2012-2016



Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Secara persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Karo dapat dikatakan rendah. Menurut hasil susenas 2015, persentase penduduk yang melek huruf sebanyak 99,26 persen dan buta huruf 0,74 Persen.

Tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf dapat di jadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 5.1

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf
Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin, 2016

KEPANDAIAN MEMBACA DAN MENULIS	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	99,40	97,85	98,61
Huruf Arab	5,14	5,82	5,49
Huruf lainnya	3,91	1,11	1,00
Buta huruf	0,88	1,31	0,74
JUMLAH	100	100	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Jika diperhatikan dari kepandaian membaca dan menulis penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf latin 99,40 persen dan perempuan 97,85 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf arab laki-laki sebesar 5,14 persen sedang perempuan 5,82 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf lainnya laki-laki sebesar 0,88 persen dan perempuan sebesar 1,11. Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang buta huruf laki-laki sebesar 0,15 persen dan perempuan sebesar 1,31 persen.

KETENAGAKERJAAN



<https://karokab.bps.go.id>

6 Ketenagakerjaan

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (economically active) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (uneconomically active) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Karo diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Karo dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran pada tahun 2015 (data tahun 2016 tidak tersedia). Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2015

Kegiatan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
Angkatan kerja	116 056	88,50	112 151	82,12	228 207	85,25
- Bekerja	112 892	86,09	110 230	80,71	223 122	83,32
- Pengangguran	3 164	2,41	1 318	1,41	5 085	1,91
Bukan Angkatan kerja	15 075	11,50	24 418	17,88	39 493	14,76
Jumlah	131 131	100,00	136 569	100,00	267 700	100,00
T P A K (%)	88,50		82,12		85,25	
TPT (%)	2,73		1,71		2,23	

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai:

- (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan
- (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Pada tabel 6.1 dapat disimpulkan bahwa tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Karo adalah 267.700 orang yang terdiri dari 228.207 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 39.493 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Karo tahun 2015 sebesar 85,25 persen, artinya bahwa pada tahun 2015 sebanyak 85,25 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Karo siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 di Kabupaten Karo sebesar 2,23 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan penduduk laki-laki yaitu sebesar 1,71, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 2,73. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo cenderung di dominasi oleh penduduk perempuan.

Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT di Kabupaten Karo pada tahun 2015 di bawah 10 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa di Kabupaten Karo pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

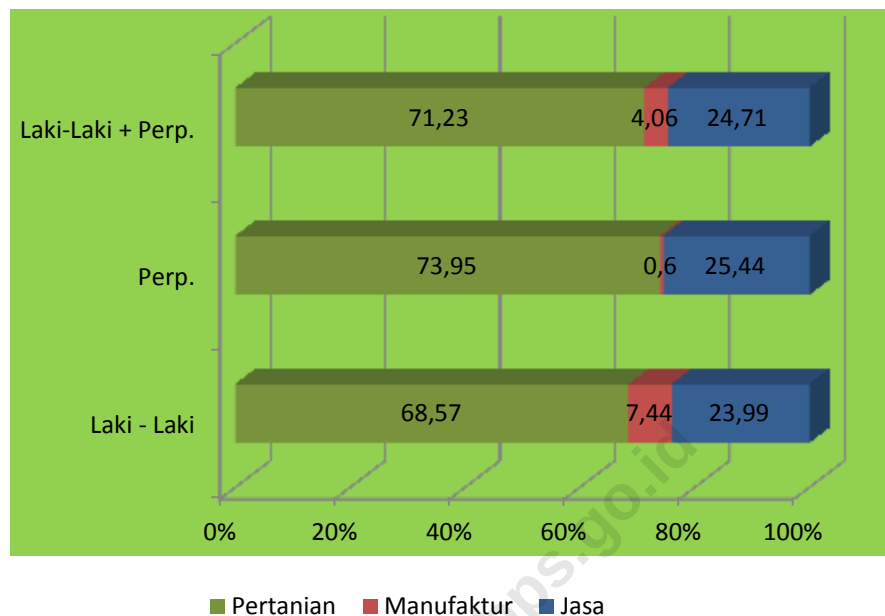
Karakteristik Penduduk Bekerja

Lapangan Pekerjaan

Dalam memudahkan analisis pada sektor perekonomian, maka lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor agriculture (pertanian), sektor manufacture/manufaktur (pertambangan/penggalan, industri, listrik gas dan air serta bangunan), serta sektor service/jasa (angkutan, perdagangan, keuangan dan jasa) atau ketiga kelompok tersebut dapat dikelompokkan sebagai sektor Primer, Sekunder dan Tertier.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo. Secara umum pada tahun 2015 sebanyak 71,23 persen penduduk Kabupaten Karo bekerja di sektor pertanian, kemudian disusul sektor jasa sebesar 24,71 persen dan sisanya 4,06 persen pada sektor manufaktur seperti yang terlihat pada grafik 6.1.

Grafik 6.1. Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Karo menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2015

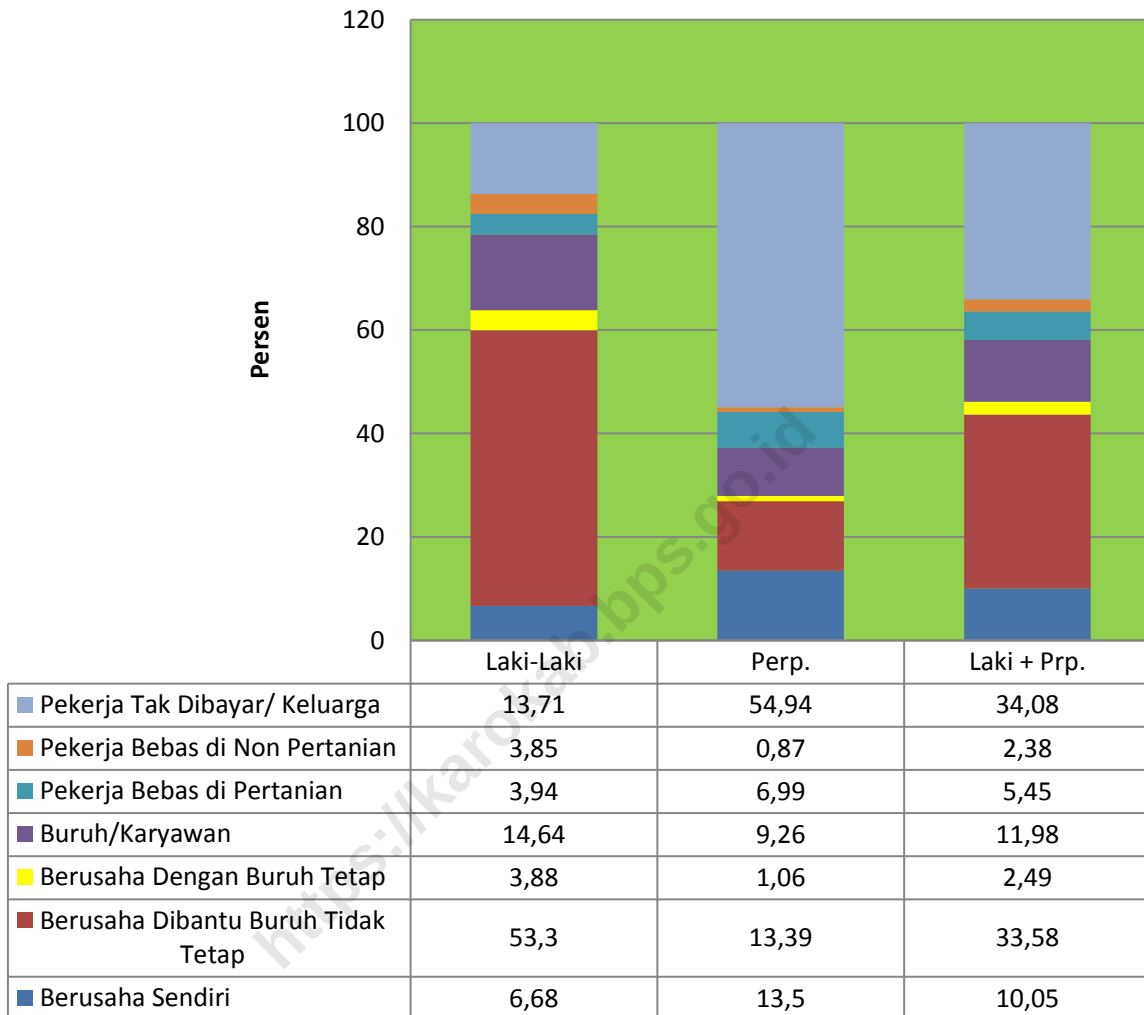


Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relative 'tradisional'. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama dikalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Grafik 6.2. Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Karo Menurut Status Pekerjaan, 2015



Pada umumnya penduduk Kabupaten Karo yang bekerja adalah sebagai pekerja tak dibayar/ keluarga. Grafik 6.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 34,08 persen pekerja di Kabupaten Karo berstatus pekerja tak dibayar/keluarga, kemudian diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap (33,58%) dan buruh/karyawan 11,98 persen.



TARAF DAN POLA KONSUMSI

<https://karokab.bps.go.id>

<https://karokab.bps.go.id>

7

Taraf dan Pola Konsumsi

Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.006.410,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 617.920,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 388.489,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 61,40 persen.

Tabel 7.1. Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Karo, 2012-2016

TAHUN	PENGELUARAN/KAPITA/BULAN			% PENGELUARAN/KAPITA/BULAN		
	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	487 710	276 879	764 589	63,79	36,21	100,00
2013	543 016	286 960	829 975	65,43	34,57	100,00
2014	538 483	297 809	836 292	64,39	35,61	100,00
2015	582 337	435 323	1 017 660	57,22	42,78	100,00
2016	617 920	388 489	1 006 410	61,40	38,60	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo, 2016

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per kapita/Bulan

Selain pertambahan pendapatan/pengeluaran, persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada tabel 7.2 dapat dilihat bahwa tahun 2016 sebahagian besar penduduk Kabupaten Karo memiliki pengeluaran sebesar Rp. 500.000,- keatas (84,70 %), dan tidak ada penduduk yang pengeluarannya dibawah Rp. 200.000,-.

**Tabel 7.2. Persentase Penduduk Kabupaten Karo Menurut
Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2012 - 2016**

TAHUN	GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN				JUMLAH
	Kurang dari 200.000	200.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000 Keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	0,00	2,94	26,23	70,84	100,00
2013	0,00	1,95	16,82	81,23	100,00
2014	0,00	0,00	18,78	81,22	100,00
2015	0,00	0,65	12,15	87,20	100,00
2016	0,00	0,36	14,94	84,70	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo, 2016



PERUMAHAN

<https://karokab.bps.go.id>

8 Perumahan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

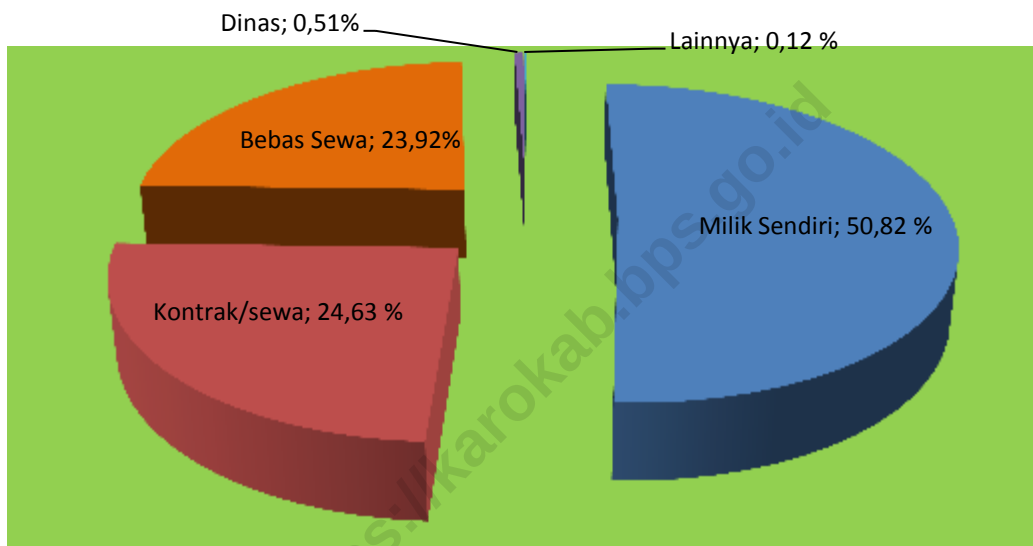
Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator *backlog* perumahan.

Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Karo, 2016



Berdasarkan informasi pada Grafik 8.1, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Karo yakni mencapai sekitar 50,82% mendiami rumah milik sendiri, kemudian 24,63% mendiami rumah kontrak/ sewa dan 23,92% bebas sewa, sedangkan sisanya (0,63%) mendiami rumah dinas dan lainnya. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mendiami rumah milik sendiri inilah yang sering digunakan sebagai acuan dalam target penyediaan rumah di Kabupaten Karo maupun nasional.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumah tangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahtraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya.

Tabel. 8.1. Kondisi Perumahan Kabupaten Karo, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M ²)	22,77	22,50	20,66
2. Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	97,71	98,98	98,18
3. Rumah tangga dengan dinding rumah Tembok (%)	45,60	42,98	45,13
4. Rumah tangga dengan atap beton, genteng, sirap dan seng (%)	99,37	98,29	98,44

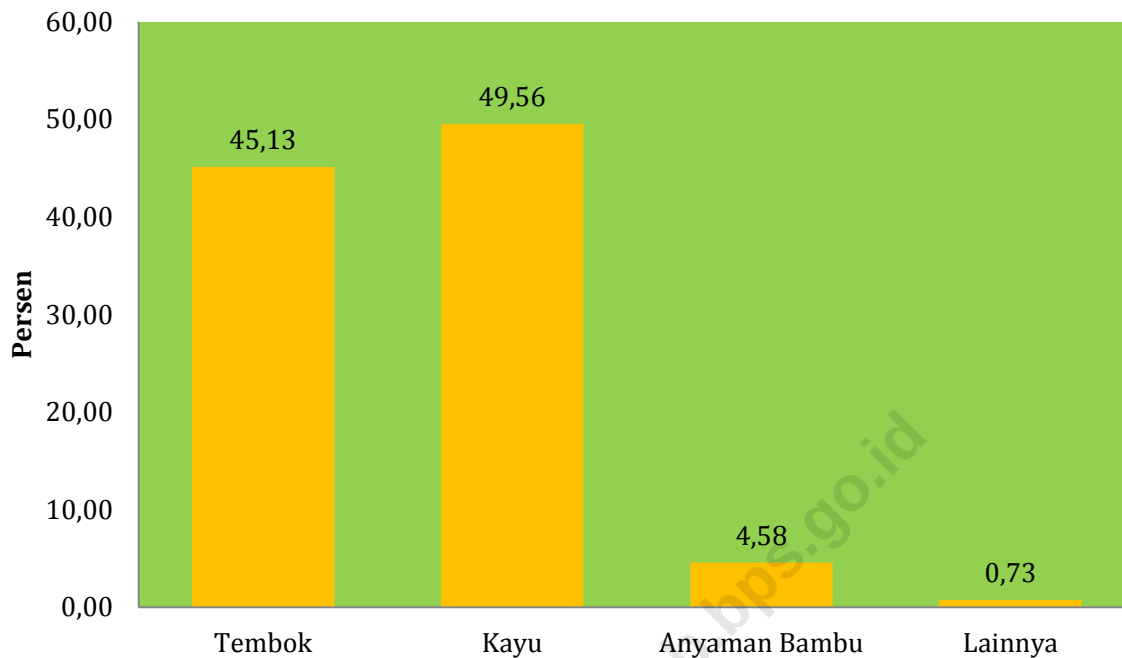
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Kabupaten Karo menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2016 rata-rata rumah tangga di Kabupaten Karo memiliki luas lantai per kapita sekitar 20,66 m².

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada tabel 8.1. diketahui bahwa sekitar 98,18 persen rumah tangga di Kabupaten Karo tinggal di Lantai bukan tanah, berarti masih ada sekitar 1,82 persen rumah tangga yang tinggal di rumah dengan lantai tanah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2016, sekitar 45,13 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan dinding tembok. Walaupun demikian Selain tembok bahan lain yang sangat dominan adalah kayu yakni sekitar 49,56 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis atap, hampir seluruhnya atau sekitar 98,44 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap beton, genteng, sirap dan seng.

Grafik 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Karo, 2016



Fasilitas Rumah Tinggal

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 99,65 persen rumah tangga di Kabupaten Karo menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN dan ini meningkat dibanding tahun 2014 dan 2015 yang sebesar 96,12 persen dan 99,47 persen.

Tabel 8.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	96,12	99,47	99,65
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	41,89	49,44	57,94
3. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	79,51	77,50	79,05

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan, hanya sekitar 57,94 persen rumah tangga di Kabupaten Karo tahun 2016 yang memiliki fasilitas air minum sendiri. Selain fasilitas kelayakan rumah dari aspek air minum dapat dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian diikuti dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemar relatif cukup besar.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Karo, 2014-2016

Sumber Air Minum	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Air kemasan bermerek	3,68	4,79	0,71
2. Air isi ulang	7,63	3,84	5,31
3. Leding Metean	23,41	25,81	31,79
4. Leding eceran	1,16	5,43	0,95
5. Sumur bor/pompa	24,26	18,26	20,03
6. Sumur terlindung	0,89	2,29	2,68
7. Sumur tak terlindung	0,00	0,68	0,32
8. Mata air terlindung	30,56	37,02	35,54
9. Mata air tak terlindung	6,30	0,95	2,54
10. Air sungai/permukaan	0,06	0,58	0,13
11. Air hujan	2,05	0,37	0,00
12. Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo tahun 2016 menggunakan sumber air minum dari mata air terlindung yaitu mencapai 35,54 persen, leding meteran 31,79 persen dan air dari sumur bor/pompa 20,03 persen. Hal ini wajar karena pada sebagian daerah Kabupaten Karo adalah pedesaan yang memiliki banyak sumber mata air, dan tidak/belum tersedianya fasilitas air ledeng. Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo sudah mempunyai fasilitas sendiri (79,05%).

Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Karo, 2016

Tempat Penampungan Kotoran/tinja	2016
(1)	(4)
1. Tangki Septik/SPAL	82,14
2. Kolam/sawah/sungai/danau/laut	10,05
3. Lobang tanah/pantai/tanah lapang/kebun	5,91
4. Lainnya	1,89
J u m l a h	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik/ SPAL merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Kabupaten Karo yaitu sebesar 82,14 persen. Selain itu masih terdapat sekitar 10,05 persen tempat penampungan di kolam/sawah/sungai/danau/laut dan 5,91 persen di lobang tanah/pantai/tanah lapang/kebun serta 1,89 persen di tempat lainnya



KEMISKINAN

<https://karokab.bps.go.id>

<https://karokab.bps.go.id>

9 Kemiskinan

Perkembangan Penduduk Miskin

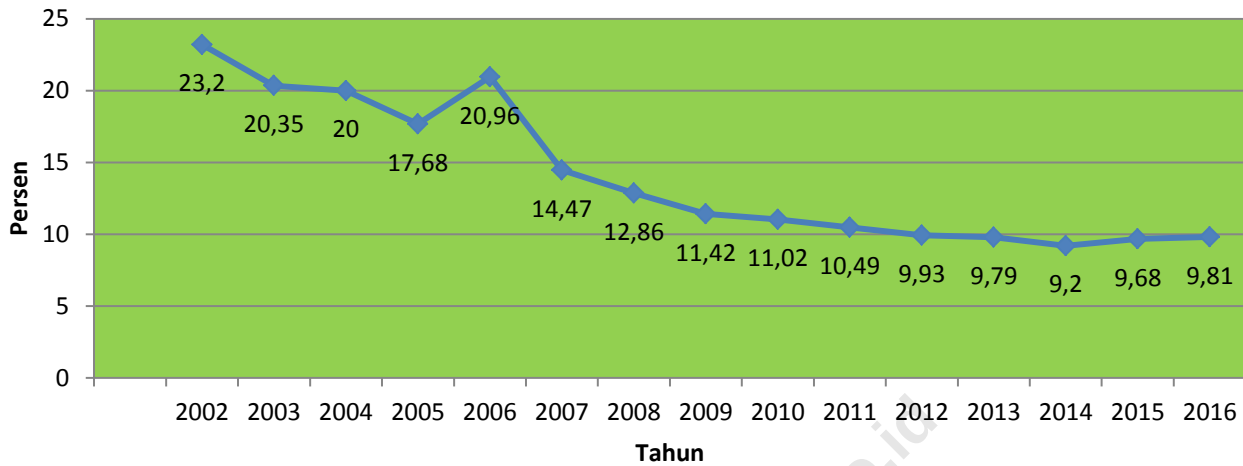
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2002 persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo sekitar 23,2 persen kemudian turun menjadi 20,35 persen, pada tahun 2003. Angka ini kembali turun menjadi 12,86 persen pada tahun 2008 dan 9,2 persen pada tahun 2014, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 9,81 persen.

**Grafik 9.1. Trend Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo, 2002-2016**



Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah *gini ratio*. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Berdasarkan data pada Tabel 9.1. pada tahun 2016, *gini ratio* Kabupaten Karo menurun menjadi 0,3283.

Tabel 9.1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Karo, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase penduduk miskin (%)	9,2	9,68	9,81
2. Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	35.36	37.52	38.74
3. Gini Ratio	0,2710	0,3368	0,3283

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://karokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARO**

Jl. Jamin Ginting No. 131, Raya, Berastagi
Telp. : (0628) 92675, Fax. : (0628) 92851
Homepage : <http://karokab.bps.go.id> E-mail : bps1211@bps.go.id

